

Menyimak Misi Arnoldus Janssen Dalam Dimensi Sejarah: Suatu Pendekatan Meta-Historis*

Oleh. **P. Donatus Sermada, SVD****

Abstract:

The mission of Arnold Janssen is reflected in the light of meta-historical approach. The main points this meta-historical approach is focusing on are the universal problems of the humanity along the human history, and one of the universal problems like the plurality of the values and its preference is pointed out by the author in his searching for the bridge of the three different and particular realities of the human history, i.e. the German history at 19th century during the life of Arnold Janssen; the Indonesian history at the 19th century during the time of Arnold Janssen and the situation of SVD Indonesian mission after sending out the missionaries abroad. The author tries to encounter the peculiarity of Arnold Janssen's commitment in his mission with the said universal problem of humanity, and from that point of view the author makes further reflection on its relevancy for the SVD Indonesian mission nowadays.

1. Arti Pendekatan Meta-Historis

Pendekatan meta-historis berhubungan langsung dengan pendekatan filsafiah terhadap sejarah. Meta-historis berasal dari kata “*meta*” dan “*historia*”. Meta berarti “di belakang, di balik, melampaui”, dan historia berarti sejarah. Meta-historis berarti di balik sejarah. Karena itu, pendekatan meta-historis menunjuk kepada dua hal yang harus ada, yaitu sejarah dan hal yang berada di balik sejarah.

Sejarah dalam pengertian umum adalah kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, termasuk semua yang berhubungan dengan aktivitas manusia di masa lampau, entah sejarah pribadi atau sejarah bangsa. Tetapi sejarah saja belum cukup, karena sejarah hanya

terbatas pada kenyataan masa lampau manusia. Sejarah harus berhubungan dengan kemanusiaan. Kemanusiaan tidak hanya menyentuh segala sesuatu yang menyangkut eksistensi manusia di masa lampau, tetapi juga keseluruhan kemanusiaan dengan segala macam aspek hidupnya yang merentang dari zaman lampau, kini dan yang akan datang. Sejarah adalah wajah kemanusiaan dalam waktu.

Hal kedua yang harus ada dalam pendekatan meta-historis adalah kata “*meta*” itu sendiri, yang berarti sesuatu yang berada di balik sejarah. Sesuatu yang berada di balik sejarah haruslah bersifat universal baik dalam hubungan dengan kemanusiaan yang bersifat religius maupun kemanusiaan pada umumnya, karena dimensi ini justru merangkum semua sejarah kemanusiaan partikular. Dengan titik tolak pada hal yang universal ini segala peristiwa dan kejadian yang bersifat partikular, lokal dan temporal dapat dijumpai dan dapat direfleksikan lebih lanjut.¹ Satu elemen universal kemanusiaan yang senantiasa ditemukan dalam sejarah apa pun adalah persoalan-persoalan kemanusiaan yang universal seperti keadilan dan ketidakadilan, kebenaran dan kesalahan, kejahatan dan Allah, kebebasan dan keharusan, nilai dan preferensi nilai dan sebagainya. Perspektif “*meta*” memperhatikan persoalan-persoalan kemanusiaan yang universal itu.²

Maka, pendekatan “meta-historis” mengandaikan dua hal itu: meta dan historia. Itu berarti bahwa harus ada sejarah partikular yang berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain dan dari satu masa ke masa yang lain, bahkan dari satu jenis sejarah ke jenis sejarah yang lain seperti sejarah sosial, sejarah budaya, sejarah agama dsb. Keanekaragaman sejarah partikular itu lalu dipantau dan diteliti dengan titik tolak kemanusiaan universal dan persoalan-persoalan kemanusiaan yang universal. Unsur universal dan persoalan kemanusiaan yang universal itulah yang menjadi jembatan antar sejarah partikular. Dari penelitian seperti ini kita lalu dapat memahami apa yang menjadi kekhasan sejarah tertentu dalam konteks lokal, partikular dan temporal. Setelah kita memahami apa yang menjadi milik bersama dan apa yang menjadi

¹ Emil Angehrn, “Geschichtsphilosophie”, *Grundkurs Philosophie* 15: Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1991, hlm. 162-163. Bdk. Karl Jaspers, *Vom Ursprung und Ziel der Geschichte*, Frankfurt/M: Fischer Bucherei, 1956, hlm. 236-240.

² Hans Joachim Klimkeit, *Der Leidende Gerechte in der Religionsgeschichte*, In: *Religionswissenschaft. Eine Einführung*. Zinzer Harmut (Hg.), Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1988, hlm. 164-165.

kekhsan sejarah tertentu, maka kita boleh beranjak untuk merefleksikan lebih lanjut kepentingan dan relevansinya untuk umat manusia dewasa ini.

Pendekatan meta-historis coba kita terapkan pada topik tulisan ini: **Menyimak Misi Arnoldus Janssen Dalam Dimensi Lintas Sejarah**. Di dalam topik ini kita meneliti sejarah Jerman abad 19 dan misi Arnoldus Janssen sampai pada awal berdirinya rumah misi. Dari situ kita lompat ke pembahasan kita tentang sejarah Indonesia pada masa Arnold Janssen dan misi Gereja Katolik. Kedua penggalan sejarah partikular itu dilengkapi oleh sejarah SVD Indonesia dewasa ini sejak pengiriman pertama misionaris SVD pertama Indonesia ke luar negri dalam situasi aktual Indonesia. Dari ketiga penggalan sejarah partikular ini coba kita temukan satu mata rantai historis yang memperlihatkan elemen-elemen universal sejarah umat manusia dan persoalan kemanusiaan universal, dan dengan berpijak pada elemen-elemen itu, kita membuat refleksi lebih lanjut tentang kepentingan dan relevansinya untuk SVD Indonesia dewasa ini.

2. Meneropong Misi Arnoldus Janssen Dalam Tiga Wajah Sejarah

2.1. Jerman abad 19 dan Misi Arnoldus Janssen sampai berdirinya Rumah Misi

Jerman abad 19 ditandai dengan abad ilmu pengetahuan dan peradaban.³ Semangat zaman pencerahan yang berhembus di seluruh Eropa pada abad sebelumnya disikapi secara intensif dan sistematis. Sekolah-sekolah dan universitas-universitas dibuka untuk menjadi sarana penyalur nilai-nilai humanisme, liberalisme, nilai-nilai budaya klasik, kesenian dsb. Munculnya peta kekuatan baru yang membangun orientasi hidup di bidang politik dan masyarakat, yaitu peta politik kekuatan ekonomi, industri, kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnik. Kata “peradaban” (*Zivilation*) dimengerti sebagai kemudahan-kemudahan hidup yang diperoleh berkat bantuan tehnik dan industri, terutama semua usaha pembenahan hidup yang memungkinkan masyarakat untuk hidup layak dan sejahtera.⁴

Masa antara awal abad ke 19 sampai dengan revolusi 1848 diresapi oleh semangat perjuangan kemerdekaan dan penegakan kedaulatan rakyat Jerman. Melalui kongres di Wina

³ Wilhelm Goessmann, *Deutsche Kulturgeschichte im Grunriss*, Muenchen: Max Hueber Verlag, 1978, hlm. 97-122.

⁴ *Ibid.*, hlm. 97.

pada tahun 1815 setelah kekalahan Napoleon (Perancis) didirikannya satu ikatan kesatuan Jerman (Deutsche Bund) di bawah kekuasaan Prusia untuk memperjuangkan kepentingan politis Jerman secara lebih luas.

Puncak dari perjuangan kebebasan dan kedaulatan itu adalah peristiwa Maret 1848 yang dikenal dengan nama revolusi Maret, gema dari kerusuhan Perancis bulan Februari tahun yang sama. Revolusi ini dijalankan oleh kelompok cendekiawan dan rakyat kebanyakan. Mereka menuntut kebebasan dan pemerintahan yang demokratis. Di gereja St. Paulus Frankfurt terselenggarakan satu perkumpulan nasional yang menyerukan pembentukan satu kerajaan Jerman atas dasar kebebasan dan kedaulatan rakyat. Untuk itu, satu komite nasional berhasil membuat rancangan undang-undang dasar yang memuat hak-hak dasar warga seperti semua warga Jerman berkedudukan sama di hadapan hukum. Hak istimewa para bangsawan dihapuskan, kebebasan berpendapat dan beragama dijamin, pribadi manusia dijunjung tinggi tanpa syarat. Tetapi perkumpulan nasional tidak berhasil mendirikan kerajaan Jerman yang dicita-citakan, karena rancangan undang-undang itu tidak disetujui oleh raja Friedrich Wilhem IV dari Prusia dan juga ada kekuatan politis yang tidak setuju dengan pemisahan diri dari kerajaan Austria.

Ketika revolusi 1848 berlangsung, Arnold Janssen berumur 11 tahun. Beliau barusan menyelesaikan sekolah dasar di Goch (1844-1847), dan selama satu tahun (1848) berada di sekolah rektorat di Goch yang diperuntukkan juga untuk anak-anak yang mau menjadi imam. Tahun berikutnya (1849) dia diterima di Gymnasium milik keuskupan di Gaesdonck dekat Goch.⁵ Semangat revolusi tahun-tahun itu tentu tidak berpengaruh langsung pada diri Arnold Janssen, tetapi semangat itu sudah pasti turut mengimbasi situasi gereja Katolik, khususnya pendidikan Katolik yang ditempuh Arnold. Persoalan pokok yang dihadapi gereja Katolik ialah bagaimana hubungan antara gereja dan negara diatur, sementara ada pengalaman nyata bahwa gereja makin lama makin mendapat tekanan dari Negara, dan dalam hal ini kekuasaan Prusia makin lama makin mendominasi seluruh bidang kehidupan di Jerman. Gereja menuntut kebebasan (*libertas ecclesiae*). Kelompok konservatif dalam tubuh gereja Katolik menolak kekuasaan mutlak negara atas gereja, sementara kelompok liberal menginginkan satu wajah gereja yang membiarkan umatnya untuk menentukan jati diri secara bebas. Konferensi para

⁵ Alex Beding (Penter.), *Ditangkap dan Diutus Oleh Roh*, Ende: Percetakan Arnoldus, 1993, hlm. 15.

Uskup Jerman di Wuerzburg pada 22 Oktober-16 November 1848 menggariskan satu pedoman pastoral yang menjembatani semangat zaman modern yang nyata dalam perjuangan kemerdekaan rakyat dan tuntutan kemerdekaan gereja untuk mengatur diri.⁶

Masa antara revolusi rakyat 1848 sampai dengan pembentukan kerajaan Jerman pada tahun 1871 ditandai oleh kemajuan pesat di bidang ekonomi.⁷ Proses industrialisasi yang tidak dapat dielakkan lagi memudahkan meningkatnya produksi di bidang pertanian, karena banyak hal yang dikerjakan dengan tangan sebelumnya sudah diganti dengan mesin-mesin. Kebebasan rakyat untuk berdagang dan untuk membangun ekonomi rumah tangganya sendiri semakin luas dijamin. Jaringan antar kota sudah dibangun dengan rel-rel kereta api untuk memudahkan transportasi barang dan jasa. Terciptanya persatuan bea cukai Jerman yang untuk pertama kalinya tidak melibatkan Austria turut memperkuat nasionalisme Jerman di bidang pengaturan ekonomi wilayahnya. Dengan persatuan ini tidak lagi ada penarikan pajak hasil bumi dari satu wilayah ke wilayah yang lain di dalam wilayah Jerman.

Kemajuan ekonomi membawa dampak pada ekspansi politik tokoh besar terkenal dalam kerajaan Prusia, yaitu Otto von Bismarck yang menjabat sebagai Perdana Menteri sejak 1861. Beliau bermaksud mendirikan kerajaan Jerman yang hendak melepaskan diri dari Austria.⁸ Di bawah pengaruhnya wilayah-wilayah dalam ikatan kesatuan Jerman perlahan-lahan bergabung dengan Prusia. Wilayah-wilayah Jerman Selatan masuk dalam kesatuan bea cukai Jerman dan melepaskan diri dari ikatannya dengan Austria-Hongaria. Wilayah Schleswig-Holstein direbut dari tangan Denmark 1864 dan dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Prusia. Perang melawan Austria 1866 mengakibatkan kekalahan Austria di Koeniggraetz di bawah jendral Prusia Helmut von Moltke. Kerajaan Hannover yang sebelumnya berada di tangan Inggris bergabung dengan Prusia, dan persekutuan wilayah-wilayah Jerman Utara membangun sekutu dengan Prusia. Wilayah-wilayah Jerman Selatan membentuk pakta pertahanan dengan Prusia untuk menghadapi musuh dari luar. Tampaknya usaha Bismarck berhasil dalam menggalang kesatuan dan kekuatan dari dalam untuk menghadapi musuhnya, dan kekuatan itu terbukti dalam

⁶ Karl Josef Rivinus, SVD, *Arnold Janssen and the Religious Situation of His Times*. Dalam: *Arnold Janssen. Yesterday and Today*, McHugh Peter (Ed.). *Analecta SVD-63/III*, Roma: Apud Collegium Verbi Divini, 1998, hlm. 14-15.

⁷ Wilhem Goessmann, *Deuscthe Kulturgeschichte im Grundriss...Op.,Cit.*, hlm. 104-108.

⁸ *Ibid.*, hlm. 100-103.

peperangan Jerman-Perancis (1870-1871) dengan kemenangan Jerman dekat Sedan. Dengan kemenangan ini, perundingan di Versailles membuahkan satu proklamasi kekaisaran Jerman yang merdeka dari kekuasaan Austria. Kaiser pertama adalah raja Prusia Wilhem I, dan Otto von Bismarck adalah perdana menterinya.

Dalam periode kedua abad itu, apa yang kita catat tentang Arnold Janssen ialah bahwa setelah beliau menamatkan SMA di Muenster (1855), beliau melanjutkan studinya di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam di Universitas Muenster (1855-1857) dan kemudian di Universita Bonn (1857-1859). Beliau menyelesaikan studinya dengan berhasil dan mendapat wewenang untuk mengajar semua fak di gymnasium. Tetapi beliau memutuskan untuk menjadi imam, dan karena itu, beliau melanjutkan studi Teologi di Muenster (1859-1861) dan ditahbiskan menjadi imam pada 15 Agustus 1861. Setelah ditahbiskan imam, beliau ditunjuk uskupnya untuk menjadi guru di Hoeheren Buergerschule di Bocholt selama 12 tahun sesuai dengan pendidikan khususnya (1861-1873).

Tampaknya bahwa Arnold tidak mempunyai kepedulian akan situasi politis yang sedang menimpa gereja Katolik di negrinya selama tugasnya sebagai pengajar di Bocholt. Dia sibuk dengan tugas mengajar dan tugas rohani, dan hampir tidak ada pernyataan patriotis dan politis yang keluar dari mulutnya untuk menyikapi situasi politis negrinya. Tetapi satu hal yang menarik dari situasi ini ialah bahwa Arnold prihatin terhadap situasi politis negrinya. Sejalan dengan pendapat para rohaniwan di wilayah Rhein, Arnold tidak bersikap simpatik dengan kekuasaan Prusia yang Protestan, dan dalam benaknya ia menginginkan agar Jerman masih bersatu erat dengan kerajaan Austria yang Katolik.⁹ Impiannya tidak terwujud, karena de facto kekuatan Prusia di bawah Bismarck mengalahkan Austria dan Perancis. Pengaruh Protestantisme yang menjelma dalam kekuatan pemerintahan Prusia tidak dapat dielakkan. Meskipun Jerman menang, menurut Arnold peperangan tetap merupakan suatu kejahatan yang mengerikan dan membawa rasa duka dan sakit hati atas kematian para serdadu di medan perang.

Situasi gereja Katolik pada masa ini ditandai oleh era “*Kulturkampf*”, yaitu era pertentangan antara negara dan gereja Katolik di bawan pemerintahan Otto von Bismarck. Periode 1850-1870, khususnya masa Konsili Vatikan I (1869-1870), ditandai oleh satu kebijaksanaan jelas yang digariskan oleh takhta suci. Gereja Katolik setempat harus menjaga dan

⁹ Fritz Bornemann, *Arnold Janssen: Der Gruender des Steyler Missionswerkes*, Steyl: Missionsdruckerei, 1970, hlm.20.

mempertahankan universalitas gereja dalam ikatan kesatuan dengan Paus sebagai pemimpin tertinggi, dan dalam soal-soal politis gereja Katolik tidak bergantung pada kekuasaan negara. Posisi yang jelas dari gereja justru menimbulkan ketegangan sosial baik di kalangan Katolik yang tidak setuju dengan pendirian itu maupun dari pemerintahan Bismarck yang melihat posisi gereja itu sebagai bahaya ketidaktundukkan umat Katolik terhadap pemerintahannya. Ketegangan ini semakin memanas, ketika Paus Pius ke IX mengeluarkan dogma tentang ketidaksesatan Paus. Posisi gereja ini justru mencerminkan kesatuan erat umat Katolik dengan pemimpinnya dan merupakan satu halangan besar di mata pemerintahan Bismarck untuk integrasi warga Katolik ke dalam masyarakat dan negara. Bismarck akhirnya melihat bahwa hirarki gereja Katolik dan kekuatan politisnya yang menjelma dalam kekuatan partai pusat Katolik (1870) di bawah pemimpin Ludwig Windthorst adalah musuh negara yang harus diperangi, karena menurut tafsiran Bismarck gereja Katolik bisa saja mengabaikan kepentingan negara.¹⁰

Hirarki Gereja dan kelompok Katolik yang mengikuti pedoman resmi gereja dicap sebagai kelompok “*Ultramontan*” yang berbahaya bagi kesatuan bangsa. Tidak secara jelas ditulis apakah Arnold Janssen setuju atau tidak setuju dengan pendirian resmi gereja itu, tetapi menurut Fritz Bornemann, Arnold Janssen menaruh minat dan simpati terhadap pendirian gereja yang resmi itu, sementara kebanyakan rohaniwan di Bocholt berkeberatan dengan sikap resmi gereja itu.¹¹ Persoalan yang paling pokok dalam era Kulturkampf bukannya terutama terletak dalam soal ajaran doktrinal yang berbeda tentang hubungan antara negara dan agama pada Protestantisme dan katolisisme, bukan juga soal percaya dan tidak percaya, tetapi soal batas-batas hubungan antara kekuatan-kekuatan spiritual yang diwakili oleh gereja dan kekuatan-kekuatan sekular yang diwakili oleh negara.¹²

Periode awal sesudah pendirian kekaisaran Jerman 1871 masih diliputi pergolakan politik dalam negeri antara pemerintah dan gereja Katolik. Banyak undang-undang dan dekret yang dikeluarkan oleh pemerintahan Bismarck berisikan pembatasan ketat aktivitas gereja, terutama para uskup dan para imam. Sekolah-sekolah Katolik berada di bawah pengawasan negara.

¹⁰ Karl Josef Rivinus, SVD, *Op.,Cit.*, hlm. 18-21.

¹¹ Fritz Bornemann, *Op.,Cit.*, hlm. 21.

¹² Karl Josef Rivinus, SVD, *Op.,Cit.*, hlm. 19.

Negara campur tangan dalam urusan perkawinan, khususnya kawin campur. Para uskup dan imam yang melanggar ketentuan *Kulturkampf* disiksa. Lima dari tujuh uskup Prusia ditahan selama beberapa bulan pada tahun 1874 dan 1875. Uskup agung Ledochowski dipenjarakan dua tahun.

Ketegangan antara gereja Katolik dan pemerintahan Bismarck meruncing ketika uskup-uskup Jerman dan Paus dalam ensikliknya "*Quod nunquam*" pada tanggal 5 Februari 1875 menolak undang-undang Mei yang menindas orang Katolik. Bismarck dan jajaran pemerintahannya memberi reaksi keras terhadap gereja Katolik dengan mengeluarkan satu peraturan yang diberlakukan pada 31 Mei 1875. Pemerintah mengusir para anggota serikat religius keluar dari Jerman, dan banyak anggota beremigrasi ke Amerika, Belgia, dan Belanda. Serikat religius yang masih ada tidak boleh lagi menerima anggota baru dan dalam tempo setengah tahun harus dilucuti. Serikat religius yang mengurus rumah-rumah sakit tidak dilarang, tetapi berada di bawah pengawasan ketat dari negara. Penindasan pemerintahan Bismarck terhadap gereja Katolik berakhir (1876), ketika terbentuk gerakan perlawanan secara legal dari partai sentral Katolik yang dipimpin oleh Ludwig Windthorst dan hirarki gereja Jerman - juga dukungan dari Vatikan - untuk mematahkan *Kulturkampf* Bismarck.

Dalam situasi yang sangat sulit untuk gereja Katolik Jerman, Arnold Janssen mendapat ide untuk mengemban misi gereja Katolik secara lebih konkrit. Ide itu adalah pembangunan rumah misi Jerman untuk pengembangan misi gereja Katolik di daerah-daerah kafir.¹³ Dalam pikirannya, imam-imam Jerman, biarawan-biarawati Jerman, kaum religius Jerman hendaknya membaktikan diri untuk menobatkan orang-orang bukan Kristen menjadi Kristen. Idennya itu sebagian diilhami oleh bacaan tentang laporan perjalanan dari pengalaman para misionaris luar negeri, sebagiannya oleh pengalamannya sendiri akan kerasulan doa yang dipromosikan kaum Jesuit di Perancis 1865 untuk kepentingan misi gereja dan juga oleh hidup religiositasnya yang mendalam.

Untuk merealisasikan idennya itu, dia berani membuat "***terobosan***" dengan melepaskan tugas mengajarnya di Bocholt pada tahun 1873, dan menjadi kapelan pada biara Ursulin di Kempen sampai Oktober 1873, supaya ia lebih leluasa menaruh perhatian pada satu kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan misi. Ia menerbitkan satu majalah bulanan dengan nama "*Der*

¹³ *Ibid.*, hlm. 21-22. Bdk. Fritz Bornemann, *Op., Cit.*, hlm.45-46.

Kleine Herz-Jezu Bote” (Utusan Kecil Hati Yesus) pada tahun 1874, terutama untuk “mendorong minat terhadap misi gereja di luar negeri di antara bangsa-bangsa kafir.”¹⁴ Majalah itu akhirnya menjadi sarana penting untuk memenangkan perhatian dan dukungan umat Katolik Jerman, para klerus, biarawan-biarawati dan para calon religius terhadap rencananya.

Ketika dia melihat bahwa negeri Katolik seperti Belgia, Irlandia, Perancis dan Italia memiliki rumah-rumah misi untuk pendidikan calon misionaris - Italia memiliki empat dan kota Paris memiliki lima rumah misi -, maka dia merasa perlu bahwa Jerman juga mempunyai rumah misi bagi calon misionaris. Meskipun mendapat ejekan dan tantangan dari pihak yang melawan rencananya dan meskipun di tanah Jerman sendiri tidaklah mungkin rencana itu terlaksana oleh karena *Kulturkampf*, ia berani membuka rumah misi St. Mikhael di Steyl di wilayah Belanda, khususnya wilayah Roermond pada tanggal 8 September 1875 atas dukungan dari banyak pihak dan atas rekomendasi dari 32 uskup (Belanda, Jerman, Austria).

Ia berani menerobosi situasi batasnya dalam kepasrahan dan ketidakpastian. Ia berkata: “Entah dari rumah ini akan dihasilkan sesuatu, hanya Allah yang tahu....Hendaknya Tuhan berbuat dengan kami, apa yang dikehendakiNya. Seandainya akan dihasilkan sesuatu di rumah ini, maka kami mau mengucap syukur untuk rahmat Allah, dan seandainya tidak dihasilkan sesuatu di rumah ini, maka dengan rendah hati kami mengetuk dada dan mengakui: Kami tidak layak bagi rahmat Allah.”¹⁵ Tiga setengah tahun kemudian dia berhasil mengirimkan dua misionaris pertama ke China, yaitu Yosef Freinademetz dari Tyrol dan Yohanes Anzer dari Bavaria.

2.2. Sejarah Indonesia pada masa Arnoldus Janssen dan Misi Gereja Katolik

Kita coba melihat apa yang terjadi di Indonesia pada masa hidup Arnold Janssen. Misi Arnold Janssen tentu belum ada, karena penerusnya yang disebut sebagai para misionaris SVD mengambil alih tugas di Indonesia baru pada awal abad ke-20. Tetapi misi Katolik di antara

¹⁴ “hauptsachlich das Interesse fuer die aeussere Mission der katholischen Kirche unter den Heiden zu erregen suchen wollte.” Karl Josef Rivinus, SVD, *Arnold Janssen und die Religioese Situation seiner Zeit*, dalam: *Arnold Janssen Gestern und Heute*, Analecta SVD, 63/II, Roma: Apud Collegium Verbi Divini, 1989, hlm. 19.

¹⁵ Alex Beding., *Op., Cit.*, hlm. 36.

bangsa-bangsa yang bukan Kristen seperti yang menjadi perhatian utama Arnold Janssen sudah ditemui di bumi Indonesia pada awal abad ke-19.

Abad 19 di bumi Indonesia oleh para ilmuwan sosial dan sejarawan disebut sebagai abad eksploitasi di bumi Indonesia dan peperangan melawan penjajahan di berbagai pelosok nusantara.¹⁶ Monopoli perdagangan di Nusantara dipegang oleh Belanda, dan para petani terutama di Jawa kehilangan tanahnya, karena tanah diambil oleh pemerintah Belanda untuk perkebunan besar. Eksploitasi memuncak ketika diterapkan sistem tanam paksa (*Kultuurstesels*) pada tahun 1830 di bawah gubernur jenderal Johannes van den Bosch, sistem tukar uang pengganti sistem barter dan sistem perpajakan. Sistem-sistem ini membawa keuntungan besar bagi pemerintahan Belanda, sementara orang pribumi khususnya petani menjadi tenaga murah yang diperas untuk kepentingan Belanda. Misalnya, dalam sistem tanam paksa rakyat dipaksa untuk menanam tanaman perdagangan seperti kopi, teh, nila, tembakau, tebu, dsb., pada tanah yang digarapnya, dan hasilnya dijual di pasaran Eropa dengan harga yang ditetapkan untuk kepentingan negara penguasa. Melalui sistem-sistem itu orang-orang pribumi terutama para petani terpinggirkan dan menjadi kelompok sosial rendah sebagai pekerja kasar dan budak, sementara lapisan sosial atas diduduki oleh para pengusaha Belanda dan pemerintahnya, kelompok Indo-Eropa, kelompok feodal pribumi yang pro-Belanda, dan lapisan menengah pengantara modal seperti Cina. Wertheim menyebut struktur sosial pada masa ini dengan nama “sistem kasta kolonial”.¹⁷

Eksploitasi itu di satu pihak membawa perlawanan pasif masyarakat biasa, tetapi di pihak lain menyentil gerakan revolusioner yang diilhami semangat Islam di bawah pemimpin-pemimpin Islam, para bangsawan, saudagar-saudagar dan raja-raja yang dirugikan oleh pemerintah Belanda.¹⁸ Terjadilah pemberontakan dan perang melawan Belanda di seluruh Nusantara: perlawanan Sultan Badarudin di Palembang (1804-1821); pemberontakan anti Belanda di bawah Pattimura di Saparua, Maluku (1817); perang Diponegoro di Jawa (1825-1830); perang Padri

¹⁶Herbert Koetter dkk, (Hrsg): *Indonesien Geographie, Geschichte, Kultur,, Religion, Staat, Gesellschaft, Bildungswesen, Politik, Wirtschaft*, Tuebingen: Horst Erdmann Verlag, 1979, hlm.83-89.

¹⁷W.F Wertheim, *Effects of Western Civilization On Indonesian Society*, New York: International Secretariat Institute of Pacific Relations, 1950, hlm.1-2.19-20.34-35.

¹⁸ Anthony Reid (Penyusun), *Sejarah Modern Awal*. Indonesian Heritage, 3: Grolier International. Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta: Edisi Bahasa Indonesia, Buku Antar Bangsa, 2002, hlm. 110-128.

(1833-1837) di bawah pimpinan Imam Bonjol di daerah Minangkabau, Sumatera Barat; pemberontakan di Banten (1850); perang melawan Belanda di Banjarmasin (1859-1863) di Kalimantan Selatan; perlawanan Ratu Bone, We Pancaitana, di Sulawesi Selatan (1858-1860); perang raja-raja Bali melawan Belanda (1840-1849) dan pemberontakan Sasak dengan kejatuhan Mataram, Lombok, ke tangan Belanda (1894); perang Aceh yang memakan waktu lama (1873-1903), dsb. Abad ke-19 dalam sejarah bangsa Indonesia adalah abad kepahitan dan penindasan rakyat banyak oleh karena pengurusan ekonomi dan politik adu domba yang dilancarkan Belanda.

Kita coba melihat situasi gereja Katolik pada abad itu. Abad ke-19 diawali dengan masa kelonggaran bergerak untuk gereja Katolik.¹⁹ Pada tahun 1807 raja Ludwig dari Belanda, saudara Napoleon, memberi instruksi kepada gubernur jendral di Indonesia untuk memperhatikan kebebasan beragama di Indonesia secara teratur.²⁰ Dengan instruksi itu dua tahun kemudian imam-imam Katolik Belanda diisinkan oleh pemerintah Belanda untuk masuk Indonesia, dan mereka digaji oleh pemerintahan Belanda dengan tujuan untuk memelihara kehidupan rohani orang Eropa di Indonesia. Mereka yang tiba di Jakarta pada tanggal 4 April 1808 adalah dua pastor projo, Pater Yakobus Nelissen yang diangkat menjadi Prefek Apostolik pertama di Indonesia dan Pater Lambertus Prinsen yang kemudian menjadi pastor Semarang.²¹ Harapan keduanya ialah bahwa mereka bisa menyebarkan injil di antara orang pribumi dan mendirikan biara Trapis di Jawa *“demi kemuliaan Tuhan di antara orang-orang yang belum beriman.”*²² Harapan itu baru terwujud ketika empat orang Jawa dipermandikan oleh Pater Y.H. Scholten pada tanggal 8 Mei 1834 ketika beliau menjabat sebagai Prefek Apostolik yang ketiga.

¹⁹ Pada masa pemerintahan VOC sampai akhir abad 18, kekristenan tidak berkembang baik karena pemerintahan Belanda lebih mementingkan ekonomi dari pada penyebaran agama. Misi gereja Katolik yang sudah ada di Ambon, Solor, Flores, oleh karena karya misionaris Portugis pada abad ke-16 umumnya dirusak dan dimusnahkan. Banyak orang Katolik di Maluku mengungsi ke Filipina dan yang lain masuk Protestan karena disuruh oleh para petinggi VOC yang Protestan. Hanya orang Katolik di Jakarta masih dengan aman menjalankan hidup keagamaannya dalam lingkungan kesultanan Banten yang toleran. Herbert Koetter dkk, *Op., Cit.*, hlm. 125-126.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 126.

²¹ G. Vriens, SJ, *Sejarah Gereja Katolik Indonesia 2. Wilayah Tunggal Prefektur-Vikariat abad ke-19 awal abad ke-20*, Ende: Percetakan Arnoldus, 1972, hlm. 24-28.

²² *Ibid.*, hlm. 94.

Pada tanggal 20 September 1842 takta suci menggantikan Prefektur Apostolik dengan membentuk Vikariat Apostolik di Indonesia. Vikaris Apostolik pertama ditunjuk Mgr. Y. Groof, Pr. (1842-1846), dan secara berturut-turut pimpinan Vikariat Apostolik dipegang oleh Mgr. P.M Vrancken, Pr., (1847-1874), Mgr. A.C. Claessens, Pr., (1874-1893), Mgr. W. Staal, SJ (1893-1897) dan Mgr. E. Luypen, SJ (1898-1923). Sejak masuknya orang Jawa ke dalam Gereja Katolik, minat orang pribumi bertambah besar, meskipun kualitas hidup orang Katolik di bidang moral dan hidup religius pada pertengahan abad ke-19 dinilai rendah. Misi di luar pulau Jawa juga mendapat perhatian, ketika Casper de Hessele dari tahun 1852-1854 mengunjungi umat Katolik di Kepulauan Maluku (Ambon, Ternate, Halmahera, dsb.), Minahasa, Timor, Larantuka (Flores), Padang, Batak, Nias.²³ Dari tahun ke tahun dalam masa pimpinan Vikariat, jumlah umat Katolik pribumi bertambah, dan menurut statistik jumlah orang Katolik di Indonesia baik asli maupun asing pada tahun 1861 sebanyak 22.183, pada tahun 1890 sebanyak 45.872, pada tahun 1895 sebanyak 49.950, dan pada 1900 sebanyak 50.294 umat Katolik.²⁴

Satu persoalan yang mencolok pada abad ini ialah persoalan hubungan antara gereja dan negara.²⁵ Pada tahun 1846 Mgr. Y. Groof, Pr., bersama empat imam Belanda harus diusir pulang ke Belanda oleh pemerintahan Belanda, karena mereka tidak mempunyai surat izin masuk ke Indonesia. Pemerintah Belanda berhak untuk memberi izin kerja kepada para pastor, menempatkan pastor, memberhentikan pastor dari jabatannya, dan terutama memberi gaji kepada para pastor. Pertanyaan pokok ialah bahwa di mana batas-batas kekuasaan negara dan kekuasaan gereja? Dalam hal gereja Katolik, memang sudah ada persetujuan antara takhta suci dan pemerintahan Belanda pada tahun 1847 (*Nota der Punten*), bahwa Vikaris Apostolis berhak untuk menempatkan pastor di salah satu wilayah di negara jajahan Belanda sejauh tidak membahayakan tata tertib dan keamanan pemerintahan. Gereja mendapat otonomi untuk mengatur dirinya tanpa bergantung pada pemerintah. Tetapi *de facto* pemerintah Belanda berkuasa penuh atas penempatan para pastor sesuai dengan peraturan pemerintah (*Regerings-Reglement*) Belanda pada tahun 1853 pasal 123. Dengan peraturan itu misi Katolik dipersulit karena rupa-rupa alasan, antara lain karena adanya bahaya misi ganda yang dikhawatirkan oleh

²³ *Ibid.*, hlm.94-97.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 249-250.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 34-44.

pemerintahan Hindia Belanda yang Protestan, yaitu bahaya adanya misi Katolik dan Protestan di wilayah yang sama.

Satu hal lagi yang perlu disimak pada abad ini ialah hubungan antara gereja Katolik dan Islam, karena Gereja Katolik berada di tengah-tengah lingkungan Islam yang sudah berkembang pesat dan kuat di seluruh kepulauan Nusantara sebelum abad ke-19.²⁶ Hubungan keduanya masih tetap dibayangi oleh persaingan kuat antara Islam dan Kristen akibat Perang Salib. Pada masa VOC, Gereja Katolik berada pada posisi yang tidak menguntungkan baik dalam hubungannya dengan Protestan maupun dengan Islam. Dalam hubungan dengan Protestan, peperangan antara Belanda yang Protestan dan Portugis yang Katolik untuk merebut hegemoni perdagangan di Indonesia melibatkan juga persaingan misi Katolik dan Protestan. Dalam hubungan dengan Islam, gambaran Perang Salib khususnya pertikaian antara Turki yang Islam dan Eropa yang Katolik pada akhir abad ke-16 masih membayangi dunia Islam di Indonesia. Kekuatan Portugis di Indonesia dilihat sebagai manifestasi ekspansi Katolik. Meskipun demikian, ada beberapa jemaat Katolik dilindungi oleh beberapa kesultanan di Indonesia dari ancaman luar seperti dalam kesultanan Ternate dan kesultanan Banten.

Pada abad 19 ketika kebebasan bergerak untuk gereja Katolik dijamin pemerintah Belanda, muncul juga kesadaran Islam akan adanya bahaya kristianisasi; bahaya itu ada ketika begitu banyak orang pribumi masuk Kristen dan Katolik, karena mereka didukung pemerintah Belanda. Bertambahnya penganut Katolik merupakan satu keberhasilan karena tujuan misinya adalah pertobatan orang-orang yang bukan Kristen. Sementara itu, untuk orang Islam, orang-orang pribumi yang bukan Islam bersatu dengan pemerintahan kolonial, dan itu diidentikkan dengan pemerintahan kafir yang harus diperangi. Hubungan semacam itu tentu memberi peluang bertumbuhnya konflik.

2.3. SVD Indonesia Sesudah Perutusan Perdana Dalam Sejarah Aktual

Kita menaruh perhatian pada situasi SVD Indonesia sesudah perutusan perdana para misionaris SVD Indonesia ke luar negeri hingga saat ini. Peristiwa historis yang mengawali situasi baru wajah SVD Indonesia ini adalah pengiriman misionaris SVD pertama di Papua New Guinea

²⁶ Anthony Reid., *Op., Cit.*, hlm.42-43.92.

pada tahun 1983 dari dapur formasi Ledalero, provinsi SVD Ende. Mereka adalah P. Severinus Pambut, SVD (almarhum) dan P. Yohanes Don Bosco Tou (mantan SVD). Menyusul tahun 1984 diutus lagi 5 orang dengan rincian: dua konfrater ke Papua New Guinea (P. Aloysius Wuring Lagamakin dan P. Paulus Dau Mbelo); dua konfrater ke Filipina Selatan/Mindanao (P. Petrus Keban dan P. Donatus Sermada Kelen), dan satu konfrater ke Malaysia (P. Gabriel Senda). Dari dapur formasi SVD Malang, pengiriman misionaris SVD ke luar negeri baru terjadi pada tahun 1988 dalam diri P. Yosef Purwo Tjahjanto yang dikirim ke Taiwan (SVD Cina). Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sejak pengiriman perdana itu, gerak misionaris SVD Indonesia ke luar negeri makin mantap. Tiap tahun selalu ada misionaris SVD Indonesia yang dikirim ke luar negeri, malahan pada tahun-tahun terakhir ini ada tendensi untuk mengirim lebih banyak misionaris ke luar negeri dari pada dalam negeri. Dalam dua dasawarsa pengiriman misionaris SVD Indonesia keluar negeri, kehadiran SVD Indonesia di luar negeri sudah merupakan suatu fakta yang signifikan. Mereka telah memperlihatkan citra tertentu SVD Indonesia di mata dunia.

Kapitel Jendral SVD ke 15 tahun 2000 menggarisbawahi panggilan misioner SVD sejagad, yaitu mengambil bagian dalam misi Gereja. Panggilan ini diwujudkan dalam komitmen misioner SVD sejagad, dan komitmen itu dikenal dengan nama “*Catur Dialog Profetis*”: “evangelisasi perdana dan evangelisasi ulang; komitmen kepada kaum miskin dan yang terpinggirkan; kesaksian lintas-budaya serta saling pengertian antar agama.”²⁷ Panggilan misioner SVD sejagad itu tentu menjadi panggilan misioner SVD Indonesia, yang juga dalam komitmen misionernya tidak terpisah dari komitmen misioner SVD sejagad. Pemahaman tentang misi sebagaimana yang ditetapkan oleh kapitel tidak lagi melulu merujuk kepada misi dalam arti geografis, tetapi situasi-situasi misi di daerah *frontier*, yaitu situasi-situasi kritis kemanusiaan yang menuntut kita untuk menanggapi secara khusus dan mendesak. Dalam terang ini, SVD Indonesia tetap memberi perhatian yang sama dan seimbang baik bagi misi dalam negeri Indonesia maupun bagi misi di luar negeri. Situasi misioner-frontier tidak lagi mengenal batas-batas negara dan wilayah.

Dalam semangat ini dan berhadapan dengan fakta pengiriman misionaris ke luar negeri, kini makin lama makin terasa penting untuk merefleksikan kehadiran misionaris SVD Indonesia.

²⁷ Pernyataan Kapitel Jendral SVD ke-15 tahun 2000, *Mendengar Roh: Tanggapan Misioner Kita Dewasa ini*, Roma, 14 Juli 2000, hlm. 23-30.

Refleksi terhadap kehadiran misionaris SVD Indonesia di luar negeri hanya bisa kita jalankan melalui refleksi terhadap dapur formasi kita yang akan menghasilkan calon-calon misionaris baik untuk misionaris domestik maupun misionaris luar negeri. Tetapi refleksi ini tidak kita buat di sini. Perhatian kita lebih diarahkan kepada refleksi tentang kehadiran SVD Indonesia dalam misi domestik, yaitu komitmen misioner dalam situasi-situasi misioner-frontier di dalam realitas negara Indonesia.

Situasi historis konkrit bangsa Indonesia sejak pengiriman perdana misionaris SVD ke luar negeri sampai kini ditandai dengan gejolak sosial-politis yang membawa pergantian kekuasaan: era Suharto sampai Mei 1998; era presiden B.J Habibie 1998-1999; era presiden Megawati Sukarnoputri 2001-2004. Gereja Katolik sendiri pada era Suharto sering dicap berkolusi dengan pemerintah. Dengan kejatuhan Suharto orang berharap bahwa situasi kebebasan, demokrasi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Enam agenda reformasi ditetapkan MPR untuk menghadapi kemelut bangsa sesudah era Suharto: Amandemen UUD'45; penegakan supremasi hukum; reposisi TNI/POLRI; otonomi daerah; pemerintahan yang bersih dari KKN; kebebasan di bidang politik, ekonomi dan sosial. Tetapi de facto agenda itu tidak terlaksana semestinya.²⁸ Situasi negeri semakin terpuruk. Krisis melanda segala bidang kehidupan. Konflik horizontal menjadi-jadi dan peristiwa pemboman merebak di mana-mana. Kehidupan ekonomi rakyat memburuk, harga barang naik, dan rakyat semakin terpuruk dalam kemiskinan yang berkepanjangan.

Situasi seperti itu sungguh mencerminkan situasi misioner-frontier yang dihadapi SVD Indonesia. Butir komitmen misioner yang paling terkena dalam konteks realitas historis konkrit Indonesia adalah situasi orang-orang miskin dan yang tersingkirkan, situasi pluralitas budaya dan agama. Bila berbicara tentang situasi orang-orang miskin dan yang terpinggirkan, kita maksudkan di sini situasi kemiskinan material yang membuat orang tidak hidup layak sebagai manusia, karena kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, dan papan) tidak terpenuhi secara layak. Data tahun 1998 tentang Indonesia menunjukkan bahwa 80 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan (80 juta dari 200 juta penduduk) - tidak terhitung massa yang miskin relatif - dan

²⁸ Drs. Stef Agus, *Sambutan Dirjen Bimas Katolik Sebagai Masukan Pada Sidang Tahunan KWI Tahun 2001*, KWI 5-15 November 2001, lampiran 3, hlm.8-10.

dari 92 juta angkatan kerja, lima juta tak bisa menghidupi diri sendiri alias menganggur total.²⁹ Bila berbicara tentang situasi pluralitas budaya dan agama, kita tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang negara dan penyelenggaraan negara yang memungkinkan bertumbuhnya pluralitas budaya dan agama. Secara yuridis dan ideologis, UUD'45 dan Pancasila menjamin iklim ini, tetapi *de facto* menyebarnya gerakan-gerakan radikal yang bernafaskan ideologi untuk merebut monopoli kekuasaan telah mencoreng kewibawaan negara dan para penyelenggaranya.

Dalam situasi Indonesia yang demikian, kehadiran SVD Indonesia menunjukkan profilnya. Bila kita melihat sepintas profil kehadiran SVD di Indonesia, maka kita menemukan beberapa data ini. Menurut data dari Katologus 2002, Provinsi SVD Ende: 54 konfrater dari 227 konfrater yang berkaul kekal bekerja di paroki; Provinsi SVD Ruteng: 38 konfrater dari 92 konfrater yang berkaul kekal bekerja di paroki; Provinsi SVD Timor: 42 konfrater dari 127 konfrater yang berkaul kekal bekerja di paroki; Provinsi SVD Jawa: 72 konfrater dari 134 konfrater yang berkaul kekal bekerja di paroki.³⁰ Selain Provinsi SVD Jawa, ketiga provinsi SVD Indonesia yang lain telah menunjukkan bahwa lebih banyak konfrater tidak lagi bekerja di paroki, sementara yang sisa bekerja di bidang formasi, bidang kategorial, atau pensiun atau juga tugas-tugas khusus lain. Provinsi SVD Jawa masih memperlihatkan kehadiran lebih banyak konfrater di bidang pastoral paroki dari pada bidang kategorial. Satu profil umum yang dapat kita katakan ialah bahwa masih banyak konfrater bergerak di bidang pastoral. Tetapi dengan adanya lembaga-lembaga dan komisi-komisi yang terbentuk di tiap provinsi SVD Indonesia, tampaknya ada trend untuk menaruh perhatian besar pada bidang-bidang pastoral yang tidak parokial.

Profil kehadiran SVD Indonesia yang demikian (pastoral parokial dan kategorial) dikonfrontir dengan situasi aktual Indonesia, khususnya situasi misioner-frontier yang ada di tengah-tengah realitas bangsa kita. Profil yang bermutu hanya bisa tercapai bila komitmen misioner SVD Indonesia baik secara perorangan maupun secara bersama entah dalam pastoral parokial entah dalam pastoral kategorial menjawab dan menanggapi persoalan kemanusiaan secara tepat. Adalah tugas kita untuk selalu menguji dan merefleksikan apakah komitmen misioner kita melalui jalur parokial dan kategorial relevan dan efektif.

²⁹ Sermada Kelen Donatus, SVD, MA, "Penjajahan Budaya Dalam Bingkai Penjajahan Modern (Tinjauan Sosial Budaya)", dalam *FORUM*, No.21 Thn. XXVIII 2000, Malang: Dioma, 2000, hlm.11-19.

³⁰ Katalogus SVD 2002 dan Berita Provinsi SVD Jawa Desember 2002.

3. Mata Rantai Historis dan Refleksi Meta Historis

Ketika kita berbicara tentang misi Arnold Janssen dalam tiga wajah sejarah yang berbeda, kita mendapat kesan bahwa dalam ketiga pokok itu misi Arnold Janssen tidak mendapat sorotan. Tampaknya tidak ada hubungan historis.

Kita kembali kepada pemahaman tentang arti meta-historis. Peneropongan meta-historis memang mengandaikan adanya sejarah universal yang di dalamnya terpadu dan bersatunya sejarah-sejarah partikular yang berbeda, bahkan sejarah-sejarah partikular yang berbeda sama sekali. Sejarah universal itu adalah sejarah umat manusia, terutama sejarah persoalan-persoalan kemanusiaan. Di dalamnya tercakup sejarah pribadi seperti sejarah tokoh Arnold Janssen atau juga sejarah misi Katolik, sejarah satu bangsa atau sejarah sejarah apa pun. Sejarah persoalan kemanusiaan itulah yang mau kita gali dan kita simak dari perlukisan wajah sejarah yang berbeda tadi.

Pertanyaan kita ialah bahwa persoalan kemanusiaan apa yang tercermin di dalam tiga wajah sejarah yang kita tampilkan itu. Salah satu persoalan kemanusiaan universal yang dapat kita petik adalah pertemuan nilai-nilai yang bisa saja mengarah kepada konflik dan perbenturan nilai karena adanya preferensi nilai, yaitu mana nilai utama dan mana nilai sekunder. Preferensi nilai itu tentu dilakukan oleh para pendukung nilai entah dalam konteks individual, kolektif atau juga dalam konteks institusional. Nilai berarti tujuan atau sasaran yang dituntun oleh usaha pemenuhan kebutuhan dan kepentingan. Penghayatan nilai menuntut seleksi nilai. Preferensi nilai menjadi penting.³¹

Misi Arnold Janssen dan misi gereja Katolik baik pada abad ke-19 di Jerman dan di Indonesia maupun pada masa sekarang dalam jalur misi SVD Indonesia tetap satu. Keduanya mengemban “nilai Injili”. Preferensi utama dalam komitmen misioner adalah pewartaan nilai Injili. Secara radikal misi Arnold Janssen dan misi gereja Katolik abad 19 bertujuan untuk menobatkan orang yang bukan Kristen menjadi orang Kristen, sementara misi SVD dalam

³¹ Friedrich Fuerstenberg, *Soziale Handlungsfelder: Strukturen und Orientierungen*. Opladen: Leske + Budrich, 1995, hlm. 124-137.

konteksnya yang baru sesudah Konsili Vatikan II lebih lunak dan terbuka bukan untuk menobatkan, tetapi “*berdialog*” dengan pasangan dialognya sebagaimana yang diamanatkan dalam kapitel jendral SVD tahun 2000.

Tetapi sejarah universal memberi indikasi bahwa selalu ada realitas historis lain yang memiliki preferensi nilai yang berbeda dengan misi gereja Katolik. Sejarah Jerman pada masa Bismarck adalah sejarah permusuhan negara dengan gereja Katolik, karena negara mengutamakan nilai ketergantungan gereja dengan pemerintah. Arnold Janssen tidak bisa mendirikan satu rumah misi untuk pendidikan para misionaris di negrinya sendiri dalam situasi historis ini. Pada abad ke-19, di Indonesia ada kekuatan penjajah dan Islam yang mempunyai preferensi nilai dan kepentingan berbeda dengan gereja Katolik. Pemerintahan penjajah mau menguasai dan mengatur semua yang berhubungan dengan gereja, dan kekuatan Islam mempunyai misi yang berbeda dengan misi Kristen. Dalam situasi aktual Indonesia dewasa ini pun, realitas historis Indonesia seperti kekuatan Islam, kekuatan ekonomis, kekuatan birokrasi pemerintah dsb, yang tentu memiliki preferensi nilai mereka sendiri, menjadi pasangan dialog misi SVD Indonesia. Sejarah universal adalah sejarah pluralitas nilai dan sejarah preferensi nilai.

Kekhasan Arnold Janssen dalam pengembangan misinya terletak dalam ***tindakan terobosannya***. Ia berani mengambil langkah terobosan di dalam situasi konkrit yang tidak mungkin. Itulah komitmen misionernya yang memberi ilham bagi siapa saja yang menjalankan misi tertentu. Realitas historis Jerman tidak memungkinkan dia untuk membangun rumah misi di tanah Jerman. Dia juga mendapat ejekan dan reaksi-reaksi negatif dari para rohaniwan yang mendengar rencananya untuk mendirikan rumah misi. Kesulitan awal untuk mendapat calon membuat dia kecil hati, malah putus asa. Tetapi Arnold Janssen tetap berpendirian kuat untuk mewujudkan idenya. Ia berani mengambil langkah terobosan untuk membangun sebuah rumah misi di luar tanah Jerman.

Kekhasan itulah yang menjadi satu butir refleksi lintas sejarah. Bila kita kaitkan dengan persoalan kemanusiaan universal yang menyentuh pluralitas nilai dan preferensi nilai, maka langkah terobosan yang menjadi komitmen Arnold Janssen memberi inspirasi penting. Catur dialog profetis (dengan cara pencari iman, dengan orang miskin, dengan budaya lain, dengan agama lain dan ideologi sekular) sebagai komitmen misioner SVD sejagat, khususnya SVD Indonesia, mengandaikan bahwa SVD sebagai agen dialog berhadapan dengan partnernya yang mempunyai preferensi nilainya sendiri, dan bisa saja dengan adanya perbedaan preferensi nilai,

agen-agen dialog masuk dalam konflik dan perbenturan. Pastoral parokial dan pastoral kategorial belum menjamin adanya suatu dialog yang berhasil. Satu dialog dikatakan berhasil tidak hanya karena dijalankan dengan sikap “setia kawan, hormat dan kasih”, tetapi karena dalam proses pertemuan nilai-nilai bahkan dalam konflik nilai oleh karena preferensi nilai yang berbeda dari para agen dialog telah tercapai satu manifestasi keselamatan, kebahagiaan, kebaikan, dan kebenaran yang menjadi milik bersama seluruh umat manusia. Karena itu, langkah-langkah terobosan merupakan satu keharusan dalam kancah pertemuan nilai-nilai. Apakah SVD Indonesia berani membuat terobosan-terobosan?

Akhir Kata

Misi Arnold Janssen dalam dimensi lintas sejarah tidak terbatas pada pewartaan iman Katolik. Misinya sudah lebih berfokus pada komitmen dialog profetis yang menjawab persoalan sejarah kemanusiaan universal.

KEPUSTAKAAN

Angehrn, Emil, *Geshichtsphilosophie*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1991.

Beding, Alex (Penter.), *Ditangkap dan Diutus Oleh Roh*. Ende: Percetakan Arnoldus, 1993.

Bornemann, Fritz, *Arnold Janssen: Der Gruender des Steyler-Missionswerkes*. Steyl: Sektretariat Arnoldus Janssen, 1970.

Fuerstenberg, Friedrich, *Soziale Handlungsfelder: Strukturen und Orientierungen*. Opladen: Leske + Budrich, 1995.

Goessmann, Wilhelm, *Deutsche Kulturgeschichte im Grundriss*. Muenchen: Max Hueber Verlag, 1978.

Jaspers, Karl, *Vom Ursprung und Ziel der Geshichte*. Frankfurt/M: Fischer Buecherei, 1956.

Klimkeit, Hans-Joachim, *Der leidende Gerechte in der Religionsgeschichte*. Dalam: *Religionswissenschaft*. Zinser, Hartmut (Hg.). Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1988.

Koetter, Herbert dkk, (Hrsg), *Indonesien*. Tuebingen: Horst Erdmann Verlag, 1979.

Reid, Anthony (Penyusun), *Sejarah Modern Awal*. Indonesian Heritage, 3: Grolier International. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Edisi Bahasa Indonesia, Buku Antar Bangsa, 2002.

Rivinus, Karl Josef, SVD, *Arnold Janssen and the Religious Situation of His Times*. Dalam: *Arnold Janssen. Yesterday and Today*. McHugh Peter (Ed.). Analecta SVD-63/III, Roma: Apud Collegium Verbi Divini, 1998.

Sermada Kelen Donatus, SVD, MA, “Penjajahan Budaya Dalam Bingkai Penjajahan Modern (Tinjauan Sosial Budaya)”, dalam *FORUM*, No.21 Thn. XXVIII 2000, Malang: Dioma, 2000.

Vriens, G. SJ. *Sejarah Gereja Katolik Indonesia . Jilid 2. Wilayah Tunggal Prefektur-Vikariat abad ke-19 awal abad ke-20*. Ende: Percetakan Arnoldus, 1972.

Wertheim, W.F, *Effects of Western Civilization On Indonesian Society*. New York: International Secretariat Institute of Pacific Relations, 1950.

&&&&&

*Artikel ini diangkat dari jurnal Aditya Wacana, Tahun 1-Edisi 2 Juli-Desember 2002, dengan judul dan penulis yang sama.

****P. Donatus Sermada, SVD:** Dosen tetap STFT Widya Sasana Malang dan kini direktur Aditya Wacana Malang.